

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/P/2025
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, perlu diselenggarakan pendekatan pembelajaran secara mendalam guna memperkaya pengalaman belajar dan mendorong tercapainya kompetensi murid;

 b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendekatan pembelajaran mendalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman implementasi pembelajaran mendalam pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan pedoman implementasi pembelajaran mendalam pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman implementasi pembelajaran mendalam digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembelajaran mendalam mulai tahun ajaran 2025/2026.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/P/2025
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN
MENDALAM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan kompleks pada era yang penuh ketidakpastian. Perubahan masa depan sulit diprediksi, dan dunia yang semakin dinamis menuntut adaptasi cepat dalam pendidikan. Tantangan masa depan yang tidak pasti ini mengharuskan sistem pendidikan Indonesia untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan global, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi yang pesat.

Meskipun akses pendidikan dasar dan menengah sudah cukup baik, namun terjadi krisis pembelajaran yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Hasil studi *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada *Programme for International Student Assessment* (PISA), menunjukkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi murid Indonesia. Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia juga masih menjadi hambatan besar. Rendahnya literasi dan numerasi menunjukkan bahwa banyak murid belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, kurangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTs*) menghambat kemampuan murid dalam analisis, evaluasi, dan kreativitas. Ketimpangan mutu pendidikan antar daerah menambah kesenjangan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena proses pembelajaran di Indonesia masih cenderung berbasis hafalan, di mana siswa diarahkan untuk mengingat fakta-fakta dan mengulang informasi tanpa pemahaman mendalam. Model seperti ini belum mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi, atau menciptakan solusi yang mengakibatkan lemahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk mentransfer pengetahuan ke dalam konteks baru dan beragam, bukan sekadar menguasai materi dalam bentuk teks atau hafalan. Hal ini menuntut adanya perubahan pendekatan pembelajaran dari yang tekstual ke kontekstual, dari pasif ke aktif, dari ceramah ke eksplorasi. Dengan demikian, peserta didik tidak

hanya mampu memahami konsep secara akademis, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas kehidupan, serta mengembangkan kecakapan hidup seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan.

Transformasi sistem pendidikan nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan tersebut. Transformasi ini harus dilakukan secara terstruktur, sistemik, dan masif, dimulai dari proses pembelajaran di satuan pendidikan. Selain itu, keberagaman Indonesia merupakan modal penting untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Momentum Bonus Demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem pendidikan Indonesia untuk menciptakan generasi unggul. Populasi penduduk usia produktif di Indonesia akan besar, dan jika dikelola dengan baik akan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Namun, tantangan utama adalah memastikan generasi muda siap menghadapi masa depan dengan kompetensi yang relevan agar dapat bersaing secara global.

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan yang dikembangkan untuk menyempurnakan berbagai model pembelajaran sebelumnya seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), dan *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Pembelajaran mendalam menekankan pentingnya pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.

Murid perlu dibekali dengan keterampilan abad ke-21 yang mencakup berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, keterampilan abad 21 di beberapa negara menjadi 6 kompetensi global di mana selain keterampilan abad 21 juga ditambahkan kewargaan dan karakter. Di Indonesia, 6 kompetensi tersebut dikembangkan menjadi 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Untuk memastikan bahwa pembelajaran mendalam diimplementasikan secara konsisten dan efektif di berbagai jenjang pendidikan, diperlukan pedoman implementasi yang jelas dan disusun terstruktur. Pedoman ini memberikan arah, strategi, dan langkah-langkah bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, termasuk pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik satuan pendidikan, dan pengambil kebijakan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta ekosistem pembelajaran yang kondusif, kemitraan yang luas dan bermakna, serta pemanfaatan teknologi digital yang optimal dalam rangka mendukung

terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dan transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

B. Tujuan

Pedoman implementasi pembelajaran mendalam ini disusun dengan tujuan untuk:

1. memberikan acuan bagi unit utama dan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam.
2. memastikan koordinasi, keselarasan, serta kesinambungan program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam; dan
3. memberikan gambaran mekanisme kerja implementasi pembelajaran mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan.

C. Sasaran

Pedoman implementasi pembelajaran mendalam ditujukan untuk:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik satuan pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.
4. Mitra pembangunan pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang terlibat dalam implementasi pembelajaran mendalam.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman implementasi pembelajaran mendalam mencakup pendahuluan, tata kelola, manajemen risiko, sistem informasi dan komunikasi, pemantauan dan evaluasi, lini masa, dan penutup.

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran serta ruang lingkup pedoman implementasi pembelajaran mendalam. Tata kelola menjelaskan pembagian peran dan kewenangan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Transformasi pembelajaran tidak lepas dari berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan sehingga diperlukan manajemen risiko sebagai acuan bagi pemangku kebijakan agar mampu mengelola risiko dalam implementasi pembelajaran mendalam. Sistem informasi dan komunikasi memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam menginformasikan implementasi pembelajaran mendalam. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keselarasan interpretasi sehingga kebijakan baru dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lini masa menjelaskan kerangka tahapan implementasi pembelajaran mendalam.

BAB II

TATA KELOLA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM

Tata kelola implementasi pembelajaran mendalam menjelaskan pembagian peran para pemangku kepentingan di lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.

A. Pemerintah Pusat

1. Sekretariat Jenderal

Peran masing-masing unit di bawah Sekretariat Jenderal dalam mendukung implementasi pembelajaran mendalam sebagai berikut.

- a. Menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang mendukung penerapan pembelajaran mendalam.
- b. Melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pembelajaran mendalam kepada publik, termasuk pendidik, orang tua, dan masyarakat luas.
- c. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur teknologi pendukung pembelajaran mendalam, termasuk platform digital dan sumber daya pembelajaran berbasis teknologi.
- d. Mengembangkan dan menyebarkan praktik baik terkait pembelajaran mendalam melalui Rumah Pendidikan.
- e. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam.
- f. Mengembangkan ajang talenta yang mendorong murid untuk menerapkan pembelajaran mendalam melalui proyek, riset, dan inovasi.
- g. Menyediakan skema pembiayaan yang mendukung implementasi pembelajaran mendalam, termasuk bantuan untuk satuan pendidikan dan murid.

2. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

- a. Menyiapkan desain dan Norma Prosedur Kriteria (NPK) untuk memfasilitasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu dan calon guru, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan tentang pembelajaran mendalam.
- b. Melakukan pelatihan pembelajaran mendalam bagi tim pengembang kurikulum dan penulis modul perkuliahan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- c. Melakukan pembaharuan materi pembelajaran mendalam pada kurikulum PPG bagi calon guru dan guru tertentu.
- d. Memasukkan materi pembelajaran mendalam pada modul dan *Learning Management System* (LMS) perkuliahan PPG bagi calon guru dan guru tertentu.
- e. Menyiapkan perangkat pembelajaran untuk bimtek dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

- f. Menyiapkan narasumber bimtek dan pengajar pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan dosen/instruktur PPG.
 - g. Melakukan kegiatan bimtek narasumber *Training of Trainer (ToT)* pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - h. Melakukan koordinasi penyelenggaraan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait pembelajaran mendalam bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Memfasilitasi penyelenggaraan program PPG dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
 - j. Melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - k. Melakukan penjaminan mutu internal terhadap penyelenggaraan program PPG.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- a. Menyiapkan strategi komunikasi digital tentang implementasi pembelajaran mendalam dengan:
 - 1) merumuskan isi pesan (pesan kunci, pesan utama, dan pesan untuk semua pihak);
 - 2) memetakan media yang digunakan (webinar, komunitas belajar kepala satuan pendidikan dan pendidik, media sosial, buklet, dll.); dan
 - 3) memetakan sasaran penerima pesan (UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan).
 - b. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal berkaitan dengan butir a.
 - c. Melakukan advokasi pembelajaran mendalam untuk pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
 - d. Melakukan pendampingan pada satuan pendidikan dengan:
 - 1) melakukan pemetaan sekolah sasaran.
 - 2) menyiapkan bahan pendampingan.
 - 3) melaksanakan pendampingan dengan siklus: Refleksi Awal, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
- a. Menyiapkan desain dan Norma Prosedur Kriteria (NPK) untuk memfasilitasi peningkatan profesionalisme guru Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam penerapan pembelajaran mendalam.
 - b. Menyiapkan strategi komunikasi digital tentang implementasi pembelajaran mendalam untuk SMK dan SLB dengan:
 - 1) merumuskan isi pesan (pesan kunci, pesan utama, dan pesan untuk semua pihak);

- 2) memetakan media yang digunakan (webinar, komunitas belajar kepala satuan pendidikan dan pendidik, media sosial, buklet, dll.); dan
 - 3) memetakan sasaran penerima pesan (UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan).
 - c. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal berkaitan dengan butir a.
 - d. Melakukan advokasi pembelajaran mendalam untuk pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
 - e. Melakukan pendampingan pada satuan pendidikan dengan:
 - 1) melakukan pemetaan sekolah sasaran.
 - 2) menyiapkan bahan pendampingan.
 - 3) melaksanakan pendampingan dengan siklus: Refleksi Awal, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi.
 - f. Mengembangkan dan memperbaharui konten pembelajaran untuk SMK dan SLB.
 - g. Mengembangkan strategi kemitraan dengan dunia kerja untuk menerapkan pembelajaran mendalam di SMK dan SLB.
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam baik di SMK maupun di SLB.
5. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
 - a. Menyiapkan berbagai perangkat kebijakan yang terkait standar, kurikulum, asesmen, dan perbukuan dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam.
 - b. Melakukan pengembangan panduan implementasi pembelajaran mendalam pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 - c. Melakukan pengembangan perangkat ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam.
 - d. Memfasilitasi penyamaan persepsi pembelajaran mendalam untuk internal Kemendikdasmen.
 - e. Melakukan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
 - f. Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - a. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK)/Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK)
 - 1) Melakukan koordinasi antar UPT Kementerian untuk pelatihan implementasi pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah masing-masing.
 - 2) Mengelola perangkat pelatihan pembelajaran mendalam.
 - 3) Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan ToT dan pelatihan pembelajaran mendalam.
 - 4) Melakukan supervisi dan pendampingan pembelajaran pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan tenaga pendidik dalam rangka peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam.

- 5) Melakukan refleksi dan evaluasi pelatihan pembelajaran mendalam dan dampaknya.
 - 6) Membuat rencana tindak lanjut berbasis hasil refleksi dan evaluasi.
- b. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)
- 1) Melakukan koordinasi antar UPT untuk intervensi dalam rangka penguatan implementasi pembelajaran mendalam di daerah.
 - 2) Menyiapkan bahan bimtek bagi Dinas Pendidikan.
 - 3) Menyelenggarakan bimtek bagi Dinas Pendidikan.
 - 4) Melakukan advokasi kepada Pemda secara berkelanjutan.
 - 5) Melakukan refleksi dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
 - 6) Melakukan perencanaan tindak lanjut berbasis refleksi dan evaluasi.
- c. Balai Besar Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)/Balai Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV)
- 1) Melakukan koordinasi antar UPT Kementerian untuk pelatihan dan penjaminan mutu implementasi pembelajaran mendalam di daerah baik peningkatan kompetensi dengan UPT GTK, maupun advokasi dengan UPT PDM.
 - 2) Menyiapkan sumber daya pelatihan untuk kompetensi pembelajaran mendalam vokasional.
 - 3) Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pelatihan pembelajaran mendalam vokasional.
 - 4) Melakukan supervisi dan pendampingan pembelajaran pendidik untuk kompetensi vokasional.
 - 5) Menyelenggarakan bimtek bagi dinas pendidikan.
 - 6) Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah secara berkelanjutan.
 - 7) Melakukan refleksi dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam dan dampaknya.
 - 8) Melakukan perencanaan intervensi pembelajaran mendalam tahun berikutnya berbasis hasil refleksi dan evaluasi.

B. Pemerintah Daerah

1. Membuat kebijakan untuk implementasi.
2. Membuat perencanaan program untuk pembelajaran mendalam.
3. Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada satuan pendidikan.
4. Melakukan koordinasi dengan UPT.
5. Memfasilitasi optimalisasi kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan sebagai wadah peningkatan kompetensi berkelanjutan.
6. Pemantauan dan evaluasi ke satuan pendidikan.

C. Satuan Pendidikan

1. Merancang dan mengadaptasi kurikulum.
2. Meningkatkan kapasitas pendidik melalui pelatihan.
3. Mendorong kemitraan, kolaborasi, dan keterlibatan murid.
4. Melibatkan orang tua dan komunitas.
5. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
6. Mengoptimalkan digitalisasi pendidikan di sekolah untuk mendukung implementasi pembelajaran mendalam.
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

D. Mitra Pembangunan Pendidikan

Mitra pembangunan pendidikan adalah lembaga, organisasi serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri (*self-funding*) serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi di bidang pendidikan, seperti pelatihan dan/atau pengadaan media pembelajaran dalam bentuk cetak dan digital atau bentuk lainnya yang relevan.

BAB III MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi pemangku kepentingan, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*), dan menyediakan penjaminan memadai terkait implementasi pembelajaran mendalam. Melalui manajemen risiko, pemangku kebijakan mampu mengelola risiko dalam penerapan pembelajaran mendalam agar transformasi pembelajaran dapat terwujud secara efektif.

A. Konteks Risiko

Untuk mengatasi berbagai persepsi masyarakat yang keliru atau miskonsepsi tentang pembelajaran mendalam, Kemendikdasmen perlu melakukan mitigasi risiko ini dengan cara memberikan penjelasan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi memanfaatkan berbagai saluran media, baik secara luring maupun daring. Informasi tersebut meluruskan berbagai miskonsepsi dan persepsi yang keliru tentang pembelajaran mendalam dan menekankan bahwa pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang mampu menjadi solusi bagi transformasi pembelajaran pada jenjang dasar dan menengah di Indonesia. Saat ini, pendidikan bermutu merupakan paradigma utama yang harus dimiliki oleh semua *stakeholder* dalam ekosistem pendidikan, terutama pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Identifikasi dan Analisis Risiko

1. Miskonsepsi dan Distorsi

Perbedaan pengalaman yang dialami oleh pendidik memungkinkan mereka memiliki pemahaman yang salah terhadap suatu konsep, khususnya dalam pembelajaran mendalam. Hal ini yang menyebabkan miskonsepsi. Oleh karena itu, perlu memberikan rujukan yang jelas tentang bagaimana memahami dan menerapkan pembelajaran mendalam ke dalam aktivitas pembelajaran. Hal tersebut diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya miskonsepsi tentang pembelajaran mendalam.

Dalam konteks pemahaman belajar, ada anggapan bahwa pembelajaran mendalam hanya berarti murid harus mengingat lebih banyak informasi. Padahal inti dari pembelajaran mendalam adalah memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep hingga melakukan refleksi dalam berbagai konteks. Anggapan lain yang mungkin muncul, antara lain bahwa hanya murid dengan kemampuan akademik tinggi yang bisa berpartisipasi dalam pembelajaran mendalam. Hal tersebut merupakan sebagian kecil distorsi yang bersifat prediktif.

2. Partisipasi dan Resistensi

Pendidik perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, kondusif, dan nyaman. Mereka perlu membangun hubungan yang saling mendukung, di mana murid merasa nyaman untuk mencoba berhasil dan bahkan ketika mereka gagal. Interaksi belajar adalah

sebuah budaya pendidikan yang tidak hanya melibatkan peran perangkat ajar, melainkan juga peran pendidik sebagai kolaborator yang mampu memperlihatkan bagaimana murid mampu merespons proses belajar yang menuntut keterlibatan kognitif, emosional, dan sosial yang lebih dalam. Oleh karena itu, optimalisasi peran dalam kaitannya dengan partisipasi belajar baik dari pendidik dan tenaga kependidikan yang secara langsung terlibat di sekolah, maupun pemangku kepentingan lain sebagaimana tertuang dalam ekosistem pendidikan yang dibangun menjadi sangat penting adanya.

Sebagai sesuatu yang mungkin menjadi sebuah kebaruan (*novelty*), tidak semua murid atau bahkan tidak semua pendidik juga dapat dengan mudah menerima pendekatan ini. Hal tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membuat mereka mengalami resistensi. Beberapa faktor yang dimaksud, di antaranya: (1) informasi tentang pembelajaran mendalam yang beredar tidak berdasar pada sumber atau rujukan yang valid; (2) memiliki anggapan bahwa pendidik merasa sudah mengetahui dan menerapkan lebih dahulu pembelajaran mendalam, padahal belum pembelajaran mendalam; (3) munculnya asumsi bahwa pendekatan ini akan menambah beban kerja guru; (4) keraguan atas efektivitas pembelajaran mendalam; dan (4) tidak menganggap penting pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang selaras dan kontekstual pada masa ini.

Untuk mengatasi resistensi pendidik, satuan pendidikan perlu terlebih dahulu mengidentifikasi faktor penyebabnya. Setelah itu pendidik perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap perubahan yang terjadi. Implementasi pembelajaran mendalam bisa dimulai dari porsi yang kecil dalam keseluruhan proses pembelajaran dan ditingkatkan secara bertahap. Keputusan peningkatan penerapan pembelajaran mendalam dilakukan setelah melalui evaluasi secara berkala. Dalam perjalanannya pendidik yang berhasil menerapkan pembelajaran mendalam, baik secara individu maupun kolaboratif, perlu diberikan apresiasi dan motivasi untuk membagikan praktik baiknya kepada pendidik lain.

3. Kepemimpinan Pembelajaran

Kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) merupakan strategi pendekatan kepemimpinan pendidikan dengan menekankan pada penciptaan lingkungan pembelajaran yang mendorong pemahaman tentang materi ajar serta analisisnya lebih dalam. Strategi tersebut dikuatkan pula oleh pemenuhan kompetensi yang menjadi kebutuhan terkini dalam kerangka keterampilan abad ke-21 dan penerapan pengetahuan dalam keseharian atau dikontekstualisasikan ke dalam dunia nyata.

Kepemimpinan dalam pembelajaran mendalam tidak hanya berfokus pada manajemen sekolah atau institusi, tetapi juga pada bagaimana

pemimpin (kepala satuan pendidikan, pengawas, pendidik, atau pemimpin kebijakan pendidikan) dapat menetapkan arah strategis yang mendukung eksplorasi mendalam dan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dalam bentuk rumusan visi yang berorientasi pada pembelajaran mendalam. Selain itu, mendorong budaya kolaboratif adalah salah satu kunci kesuksesan pembelajaran mendalam sehingga hal ini perlu diperhatikan secara seksama.

C. Penanganan Risiko

Kolaborasi dan saling melengkapi adalah kunci bagi terlaksananya program implementasi pembelajaran mendalam ini di lapangan. Distribusi peran, kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kebijakan dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Melalui strategi kebijakan Partisipasi Semesta, membuka saluran dan kesempatan publik secara luas untuk ikut andil dalam pencapaian pendidikan bermutu untuk semua di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Partisipasi semesta dalam konteks pendidikan mengacu pada keterlibatan aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan ini mendorong partisipasi publik melalui konsep 'Gotong Royong Mencerdaskan Bangsa', yang mengajak berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk lebih terlibat dalam setiap kebijakan pendidikan yang dibuat. Partisipasi semesta merupakan pendekatan komprehensif yang diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat muncul ide-ide kreatif, pengawasan yang lebih efektif, serta sumber daya yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi terkini dalam rangka mendukung proses pembelajaran, terutama integrasi kecerdasan artifisial, menjadi keadaban baru guna menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Meskipun di beberapa tempat masih perlu penyesuaian, baik itu sarana prasarananya maupun kapasitas pendidik dalam mengadopsi dan mengadaptasi teknologi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat membantu menjangkau keluasan wilayah Indonesia secara merata.

D. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu risiko dilakukan melalui pengawasan terkait tata kelola implementasi pembelajaran mendalam dan efektivitas tahapan manajemen risiko. Tahap ini sangat penting untuk memantau secara berkesinambungan tentang keefektifan strategi pengendalian risiko yang dilakukan, serta untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan dalam

rangka mencegah terjadinya masalah atau menekan bahkan mengatasi dampak negatif yang terjadi.

BAB IV SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Media Komunikasi

Media komunikasi merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan, menerima, dan memproses informasi dalam suatu sistem yang menghubungkan individu, organisasi, atau teknologi. Media komunikasi berperan penting dalam sistem informasi sebagai saluran dua arah antara penyedia dan pengguna. Dalam ekosistem pendidikan, media komunikasi mendukung kolaborasi, membantu pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang tepat waktu serta memungkinkan umpan balik dan evaluasi dari pengguna. Media komunikasi ini dapat berupa media cetak, digital, atau elektronik yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien.

Demikian halnya media komunikasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dimanfaatkan dalam membangun komunikasi kepada para pemangku kepentingan, mendistribusikan informasi, kebijakan, layanan hingga evaluasi. Media komunikasi ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni daring dan luring. Untuk media daring, di antaranya sebagai berikut.

1. Media Sosial, merupakan sarana untuk melakukan penyebaran informasi, pengumpulan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang dapat berguna dalam proses pengambilan kebijakan, sebagai upaya proses keterbukaan untuk publik.
2. Laman, merupakan pusat informasi dan diseminasi kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat pendidikan, yang berisi berita, artikel, pengumuman kebijakan, program, dan sumber daya lainnya terkait pendidikan.
3. Platform Digital, merupakan suatu sistem terpadu yang menyediakan berbagai sumber daya dan alat yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, baik berupa laman, perangkat lunak maupun aplikasi yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan, seperti platform Rumah Pendidikan.
4. Akun Pembelajaran, merupakan akun yang memberikan kesempatan pendidik, murid dan tenaga kependidikan untuk mengakses berbagai sumber daya dan aplikasi pembelajaran yang dimiliki oleh Kemendikdasmen. Akun tersebut, yakni belajar.id.

Sementara untuk media luring (*offline*) Kemendikdasmen memiliki ragam media sebagai berikut.

1. Media Cetak, Kemendikdasmen bekerja sama dengan media cetak, seperti koran dan majalah untuk menyebarkan informasi dan artikel pendidikan.
2. Televisi dan Radio, Kemendikdasmen juga memanfaatkan media televisi dan radio untuk menyampaikan informasi dan program-programnya kepada masyarakat.
3. Kegiatan, Kemendikdasmen menyelenggarakan berbagai kegiatan berupa seminar, konferensi, lokakarya dan pameran untuk

berkomunikasi langsung dengan masyarakat maupun para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

4. Surat dan dokumen, Kemendikdasmen menggunakan surat dan dokumen resmi sebagai sarana menyampaikan informasi dan kebijakan kepada instansi pemerintah, sekolah, dan pihak terkait lainnya.

Melalui berbagai jenis media komunikasi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya untuk menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada masyarakat serta menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

B. Pengembangan Platform

Pengembangan platform teknologi merupakan bagian dari penerapan sistem informasi. Saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki cetak biru transformasi digital melalui platform Rumah Pendidikan. Hal ini merupakan bentuk inisiatif digitalisasi pendidikan dan pembelajaran yang melibatkan partisipasi seluruh pihak, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, orang tua dan masyarakat. Platform Rumah Pendidikan mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan digital dalam satu ekosistem yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan melalui fitur Ruang Murid, Ruang GTK, Ruang Sekolah, Ruang Bahasa, Ruang Orang Tua, Ruang Pemerintah, Ruang Publik, dan Ruang Mitra.

Dalam pengembangan dan pemanfaatannya, platform Rumah Pendidikan ini dapat dirancang untuk menyediakan berbagai informasi kerangka Pembelajaran Mendalam, yang dapat digunakan sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran yang meliputi praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Semua ini dapat diakses melalui platform Rumah Pendidikan dalam fitur Ruang GTK, Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Bahasa, Ruang Orang Tua, Ruang Publik, Ruang Mitra, dan Ruang Pemerintah.

Platform Rumah Pendidikan beserta fitur utama dan pendukung di dalamnya diharapkan dapat menjadi sarana mewujudkan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Platform ini mendukung belajar berkelanjutan secara mandiri maupun dalam komunitas tanpa batas waktu serta mendukung peningkatan karier dan kinerja pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan dengan lebih mudah, bermakna, transparan, dan bermutu. Sekaligus menjadi rujukan utama dalam mendapatkan regulasi maupun pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh lagi dalam pengembangannya, Rumah Pendidikan diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Dengan pendekatan yang mengutamakan pemahaman

konsep secara menyeluruh, fitur ini memastikan peserta didik dapat menggali ilmu dengan cara yang lebih interaktif dan inspiratif.

Platform Rumah Pendidikan diharapkan menyediakan pelatihan mandiri yang dirancang untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi secara fleksibel dan mendalam. Dengan sistem pembelajaran mandiri, pendidik dapat meningkatkan keterampilan pedagogis, profesional mereka kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan.

Demikian halnya, Rumah Pendidikan diharapkan mewadahi ruang kreativitas dan saling berbagi melalui aksi nyata yang dirancang untuk mendorong pendidik dalam berbagi praktik terbaik dan inovasi pembelajaran mendalam. Melalui fitur ini, pendidik dapat mendokumentasikan, membagikan, dan menginspirasi rekan sejawat dengan karya nyata dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran mendalam yang efektif dan bermakna di kelas.

Rumah Pendidikan pun menjadi ruang kolaborasi dengan dirancangnya fitur untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, di mana pengawas, kepala satuan pendidikan, pendidik dan murid dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pembelajaran mendalam. Melalui fitur ini, seluruh pihak terkait dapat berinteraksi dan berpartisipasi menciptakan ekosistem pendidikan yang dinamis.

C. Perlindungan dan Penanganan Keluhan

Perlindungan (*safeguarding*) dan penanganan keluhan (*complaint handling*) adalah dua aspek penting dalam pengelolaan sistem informasi yang efektif. Keduanya berkontribusi pada keamanan, keandalan, dan kualitas sistem informasi serta kepuasan pengguna.

Salah satu bentuk perlindungan adalah layanan bantuan (*helpdesk*). Fungsi layanan bantuan di antaranya membantu pengguna dalam mengatasi masalah terkait sistem informasi dan penerapan pembelajaran mendalam, mengidentifikasi pola masalah yang sering terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan serta mengembangkan daftar *frequently asked questions* (FAQ) atau soal sering ditanya (SSD).

Terkait infrastruktur sistem informasi, sistem perlindungan melindungi dari serangan siber, kegagalan perangkat keras, atau bencana alam sehingga memperkuat keamanan infrastruktur yang dikembangkan, seperti server dengan kapasitas serta kecepatan yang kuat. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur sistem informasi dan pengamanannya.

Penanganan keluhan dalam sistem informasi dan implementasi pembelajaran mendalam merupakan serangkaian proses yang dirancang untuk menerima, mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan dari pengguna atau pelanggan terkait dengan sistem informasi atau layanan yang diberikan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari

pengguna yang menyampaikan keluhan, tim dukungan teknis, hingga manajemen yang bertanggung jawab atas sistem informasi. Penanganan masalah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan terintegrasi melalui Unit Layanan Terpadu (ULT).

D. Soal Sering Ditanya (SSD)

Soal sering ditanya (SSD) adalah kumpulan pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya terkait suatu topik. SSD bertujuan untuk membantu pengguna mendapatkan informasi dengan cepat tanpa harus menghubungi layanan bantuan (*helpdesk*) atau mencari jawaban di berbagai sumber.

Soal sering ditanya (SSD) memainkan peranan penting dalam Implementasi pembelajaran mendalam karena dapat membantu menjelaskan konsep, menangani kekurangjelasan, dan memudahkan pemahaman bagi pendidik, kepala satuan pendidikan dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan menyediakan jawaban kepada berbagai persoalan yang sering diajukan, SSD dapat menyokong proses perubahan dengan lebih lancar dan efektif. Selain itu, SSD juga dapat meningkatkan komunikasi dan keterlibatan serta menumbuhkan sikap positif terhadap perubahan. SSD dapat disediakan melalui laman Sistem Informasi Kurikulum Nasional (kurikulum.kemdikbud.go.id) dan Rumah Pendidikan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Desain Pemantauan dan Evaluasi

Tahap implementasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam setiap kebijakan baru, karena sering kali ada jarak yang cukup lebar antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik implementasi di lapangan. Tantangan implementasi kebijakan berkaitan dengan interpretasi kebijakan, baik di level pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan Pendidikan. Untuk itu, perlu ada desain pemantauan dan evaluasi terstruktur sehingga kebijakan baru dapat diimplementasikan selaras antara di pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pada satuan pendidikan. Dengan terdapat pemantauan dan evaluasi serta keselarasan interpretasi, diharapkan kebijakan baru dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Desain pemantauan dan evaluasi dirancang sebelum kebijakan diimplementasikan untuk memastikan efektivitasnya. Desain pemantauan dan evaluasi ini disusun dalam tiga tahapan utama: evaluasi dokumen, evaluasi implementasi, dan evaluasi dampak. Evaluasi dokumen dilakukan sebelum kebijakan diterapkan untuk meninjau kesesuaian regulasi dan perangkat pendukung. Evaluasi implementasi dilakukan selama proses penerapan untuk menilai kesiapan dan efektivitas pelaksanaan. Sementara itu, evaluasi dampak dilakukan setelah kebijakan berjalan dalam jangka waktu tertentu guna mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi di tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

B. Indikator Keberhasilan

Secara umum indikator keberhasilan pembelajaran mendalam, yakni meningkatkan mutu pendidikan yang dilihat dari capaian hasil belajar murid. Untuk melihat indikator keberhasilan tersebut, desain evaluasi disusun ke dalam tiga bagian sebagai berikut.

1. Evaluasi dokumen, digunakan untuk menelaah dokumen pembelajaran mendalam sehingga diperoleh umpan balik perbaikan dokumen kurikulum yang telah disediakan.
2. Evaluasi implementasi, dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan implementasi pembelajaran mendalam agar diperoleh gambaran implementasi di level satuan pendidikan dan daerah.
3. Evaluasi dampak, dilakukan untuk mengukur perubahan yang terjadi di tingkat satuan pendidikan (capaian hasil belajar murid) dan daerah (meningkatnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah).

C. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Instrumen pemantauan dan evaluasi dikembangkan sesuai dengan tujuan evaluasi, sebagai berikut.

1. Evaluasi dokumen

Pada tahap ini dilakukan untuk melihat kesiapan dan kelengkapan dokumen penunjang kebijakan pembelajaran mendalam, mulai dari naskah akademik, regulasi peraturan Menteri (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Kurikulum), dokumen persiapan pelaksanaan (panduan pelaksanaan implementasi, pedoman sosialisasi, buku teks, panduan pembelajaran dan asesmen, dll), sampai pada perangkat ajar (capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dll).

2. Evaluasi implementasi

Pelaksanaan evaluasi implementasi dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Instrumen yang dikembangkan bertujuan untuk menilai keberhasilan sosialisasi dan bimbingan teknis, pemanfaatan sumber daya yang disediakan oleh Kemendikdasmen serta kesiapan satuan pendidikan, termasuk kesiapan pendidik dan kepala satuan pendidikan.

b. Tahap pelaksanaan

Instrumen yang dikembangkan bertujuan untuk melihat gambaran implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan serta komitmen dan dukungan pemerintah daerah.

3. Evaluasi dampak

Evaluasi dampak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Awal

Instrumen yang dikembangkan bertujuan untuk mengukur peningkatan mutu proses pembelajaran dan kualitas lingkungan belajar serta meningkatnya komitmen daerah dalam mendukung pembelajaran mendalam melalui regulasi, program, dan penganggaran.

b. Dampak Akhir

Instrumen yang dikembangkan bertujuan untuk mengukur hasil jangka panjang di tingkat satuan pendidikan, seperti peningkatan mutu pendidikan (literasi, numerasi, dan karakter) serta di tingkat pemerintah daerah dalam hal kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembelajaran mendalam.

D. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup beberapa langkah berikut.

1. Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi

Perencanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menentukan tujuan pemantauan dan evaluasi, menyusun indikator keberhasilan, menentukan metode pengumpulan data, dan menyusun jadwal.

2. Pengumpulan Data

Pada langkah ini digunakan untuk menggunakan metode yang sesuai, misalnya survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen, memastikan validitas dan reliabilitas data, dan menggunakan teknologi atau alat bantu lainnya.

3. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dan menganalisis kesesuaian hasil dengan indikator yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan Hasil

Pelaporan hasil digunakan untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi, menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan evaluasi.

5. Tindak Lanjut dan Perbaikan

Tindak lanjut dan perbaikan digunakan untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan, menyesuaikan kebijakan atau strategi berdasarkan hasil evaluasi, dan melakukan pemantauan lanjutan untuk melihat dampak perubahan.

BAB VI LINI MASA

Implementasi pembelajaran mendalam dirancang bertahap selama lima tahun untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, dengan fokus yang berbeda sebagai berikut.

1. Pada tahun nol (2024-2025), fokus utama pada persiapan dan uji coba melalui penyusunan naskah akademik, sosialisasi, bimbingan teknis serta pelaksanaan Sekolah Model *Quick Win* Pembelajaran Mendalam di berbagai jenjang pendidikan.
2. Pada tahun pertama (2025-2026) menitikberatkan pada uji publik dan umpan balik, sosialisasi dan strategi komunikasi, bimbingan teknis, TOT dan pelatihan, advokasi, penetapan sekolah model, pendampingan dan analisis data.
3. Tahun kedua dan ketiga (2026-2028), berdasarkan hasil evaluasi model, diarahkan pada perluasan implementasi secara nasional dengan dukungan UPT Ditjen GTK di 38 provinsi serta penguatan kompetensi pendidik melalui strategi Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB).
4. Tahun keempat dan kelima (2028-2030), pembelajaran mendalam diterapkan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan dengan memastikan keselarasan kurikulum, asesmen, dan praktik pembelajaran serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh dan sistem penjaminan mutu internal serta eksternal diterapkan secara konsisten untuk memastikan kualitas dan dampak program dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Linimasa Implementasi Pembelajaran Mendalam 2025-2030

A. Tahun Nol (2024-2025)

1. Penyusunan naskah akademik dan bahan sosialisasi
Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) bersama tim ahli menyusun naskah akademik dan bahan sosialisasi terkait kebijakan baru dalam kurikulum.
2. Sosialisasi awal dan uji publik
Sosialisasi awal dilakukan melalui uji publik dengan melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan dari berbagai pihak digunakan untuk menyempurnakan dokumen kebijakan sebelum implementasi lebih lanjut.
3. Reviu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan guna memastikan keselarasan dengan arah pengembangan kurikulum baru. Proses reviu ini mempertimbangkan perubahan kebutuhan kompetensi masa depan serta pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

B. Tahun Pertama (2025-2026)

1. Uji Publik dan Umpan Balik
 - a. Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) melalui Puskurjar bersama Tim Pengembang Pembelajaran Mendalam (TPPM) menyusun naskah akademik dan bahan sosialisasi awal tentang pembelajaran mendalam.
 - b. Naskah akademik dan bahan sosialisasi disebarakan kepada berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendapatkan masukan.
 - c. Umpan balik digunakan untuk memperkaya dan melengkapi naskah akademik sebelum tahap implementasi.
2. Sosialisasi dan Strategi Komunikasi
 - a. Sosialisasi awal dilakukan melalui webinar, *workshop*, dan distribusi materi digital kepada dinas pendidikan, sekolah, dan komunitas pendidikan.
 - b. Fokus sosialisasi adalah memperkenalkan filosofi, tujuan, dan manfaat pembelajaran mendalam kepada pemangku kepentingan, termasuk pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan orang tua.
3. Bimbingan Teknis (Bimtek), ToT, dan Pelatihan
 - a. Bimtek bagi Dinas Pendidikan:
 - 1) Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Paudikdasmen untuk mempersiapkan dinas pendidikan dalam memahami dan mendukung implementasi pembelajaran mendalam.
 - 2) Materi mencakup kebijakan pembelajaran mendalam, peran dinas dalam pendampingan, dan strategi penyediaan sumber daya.
 - b. Bimtek bagi Calon Narasumber ToT GTK
Bimbingan teknis (bimtek) bagi calon narasumber ToT dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal GTKPG untuk menyiapkan dan membekali calon narasumber ToT pembelajaran mendalam bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga mampu memfasilitasi jalannya ToT pembelajaran mendalam di UPT GTKPG dan UPT Vokasi PKPLK.
 - c. ToT bagi calon pengajar pelatihan dan pelatihan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan:
ToT bagi calon pengajar Pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh UPT GTKPG bertujuan untuk membekali calon pengajar Pelatihan pembelajaran mendalam sehingga mampu memfasilitasi jalannya Pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendekatan pembelajaran mendalam digunakan dalam pelatihan pembelajaran mendalam, dengan tahapan:
 - 1) *In-Service Learning 1* (IN-1): Pemahaman konsep pembelajaran mendalam.
 - 2) *On-the-Job Learning* (ON): Praktik langsung di satuan pendidikan.
 - 3) *In-Service Learning 2* (IN-2): Refleksi dan tindak lanjut peningkatan praktik.

4. Advokasi kepada Pemerintah Daerah
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dan kebijakan pendukung pembelajaran mendalam.
 - b. Strategi advokasi meliputi:
 - 1) penguatan kapasitas UPT dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
 - 2) penyusunan rencana program pembelajaran mendalam di tingkat daerah; dan
 - 3) kolaborasi dalam pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
5. Penetapan Sekolah Model *Quick Win* Pembelajaran Mendalam, Pendampingan, dan Analisis Data
 - a. Sekolah Model *Quick Win* Pembelajaran Mendalam dilaksanakan di sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan.
 - b. Pendampingan intensif dilakukan oleh TPPM dan UPT untuk memastikan implementasi sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam.
 - c. Data hasil piloting dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan.

C. Tahun Kedua dan Ketiga (2026-2028)

1. Perluasan Implementasi
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi pilot project, pembelajaran mendalam diperluas ke lebih banyak sekolah di tingkat nasional.
 - b. UPT Ditjen GTKPG di 34 provinsi menjadi pusat pelatihan dan pendampingan bagi pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB)
 - a. PKB dilaksanakan dengan pola 70:20:10 agar dapat meningkatkan kualitas praktik pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan, sebagai berikut.
 - 1) 70% Pengalaman: Praktik langsung di satuan pendidikan.
 - 2) 20% Sosial: Diskusi dan kolaborasi dalam kelompok kerja (komunitas belajar).
 - 3) 10% Formal: Pelatihan terstruktur di UPT atau di kelompok kerja (komunitas belajar).
 - b. Komposisi 70:20:10 dapat diadaptasi secara proporsional berdasarkan kebutuhan PKB PTK dengan pembelajaran berbasis pengalaman yang memiliki komposisi lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran berbasis sosial dan pembelajaran berbasis formal.

Pembelajaran berbasis formal didapatkan dari berbagai pelatihan formal di BBGTK/BGTK/KGTK, Pemerintah Daerah, Mitra Pembangunan, dan/atau pelatihan mandiri. Pembelajaran

berbasis sosial pada hakikatnya adalah belajar dari dan bersama orang lain dalam suatu wadah peningkatan kompetensi, seperti di Kelompok Kerja/Komunitas Belajar dengan sesama rekan sejawat, atau belajar bersama mentor/*coach*. Adapun pembelajaran berbasis pengalaman merupakan belajar dari pengalaman, misalnya mencoba model atau pendekatan pembelajaran baru untuk membuat murid lebih aktif, atau mengerjakan penugasan yang menantang untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan lain-lain.

3. Advokasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda)
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dan kebijakan pendukung pembelajaran mendalam
 - b. Strategi advokasi meliputi:
 - 1) Penguatan kapasitas UPT dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
 - 2) Penyusunan rencana program pembelajaran mendalam di tingkat daerah.
 - 3) Kolaborasi dalam pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
4. *Safeguarding dan Complaint Handling*
 - a. Mekanisme pengaduan (*complaint handling*) disiapkan untuk menangani kendala atau masalah dalam implementasi pembelajaran mendalam.
 - b. Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal diterapkan untuk memastikan kualitas pelaksanaan pembelajaran mendalam.

D. Tahun Keempat dan Kelima (2028-2029)

1. Implementasi Menyeluruh di Seluruh Satuan Pendidikan
 - a. Pembelajaran mendalam diterapkan secara nasional di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - b. BSKAP dan Puskurjar memastikan keselarasan antara kurikulum, asesmen, dan praktik pembelajaran di kelas.
2. Refleksi dan Rencana Tindak Lanjut
 - a. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengukur dampak pembelajaran mendalam terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid.
 - b. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut, termasuk perbaikan kurikulum, pelatihan pendidik, dan pendampingan sekolah.
3. Penguatan Ekosistem Pendidikan
 - a. Sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran mendalam.

- b. Program-program turunan, seperti pengembangan komunitas belajar dan pemanfaatan teknologi pendidikan, terus dikembangkan.
 4. Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal
 - a. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPME) diterapkan secara konsisten untuk memastikan standar kualitas pembelajaran mendalam.
 - b. Akreditasi sekolah dan sertifikasi guru diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam.
- E. Tahun Kelima (2029-2030)
1. Refleksi dan Keberlanjutan

Evaluasi hasil dan pembelajaran dari pemantauan dan evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengidentifikasi pencapaian, tantangan, dan pembelajaran dari implementasi pembelajaran mendalam selama lima tahun. Data yang diperoleh menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis terkait perbaikan dan pengembangan program ke depan.
 2. Keberlanjutan Pedagogis

Kajian terhadap tingkat komitmen berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan, termasuk siswa, pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, akademisi, dan praktisi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan praktik pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam. Hasil kajian ini digunakan untuk merancang strategi peningkatan kapasitas dan penguatan ekosistem pembelajaran.
 3. Keberlanjutan Kebijakan

Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, akademisi, dan pengambil kebijakan, dianalisis untuk memastikan keberlanjutan implementasi pembelajaran mendalam. Strategi advokasi dan komunikasi kebijakan diperkuat guna meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap pembelajaran mendalam.
 4. Keberlanjutan Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam ditinjau pada tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Kebijakan pendanaan yang berkelanjutan dipastikan agar implementasi pembelajaran mendalam tetap berjalan dengan dukungan finansial yang memadai.
 5. Pengembangan Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Hasil refleksi dan evaluasi digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi lanjutan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan sistem, penguatan kapasitas pendidik serta pengembangan program pendampingan bagi sekolah agar pembelajaran mendalam tetap menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

BAB VII PENUTUP

Implementasi pembelajaran mendalam merupakan langkah strategis dalam mentransformasi pendidikan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan keterampilan abad ke-21, karakter serta nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi penting bagi generasi masa depan. Dengan pembelajaran mendalam diharapkan tercipta proses pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sehingga setiap murid dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.

Keberhasilan pembelajaran mendalam bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pendidik, kepala satuan pendidikan, hingga orang tua dan masyarakat. Sinergi yang kuat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kesenjangan mutu pendidikan, keterbatasan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik. Dengan dukungan yang berkelanjutan, pembelajaran mendalam dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya, diperlukan serangkaian langkah strategis yang terarah dan sistematis. Peningkatan kapasitas pendidik menjadi prioritas utama melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar mereka dapat mengadopsi pembelajaran mendalam secara efektif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran inovatif. Selain itu, penyediaan infrastruktur pendukung juga harus menjadi perhatian, terutama dalam pemerataan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, khususnya teknologi digital yang menunjang pembelajaran yang lebih inklusif. Penguatan kolaborasi lintas sektor juga harus terus didorong, baik antara sekolah, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, agar tercipta ekosistem pendidikan yang lebih kondusif. Lebih lanjut, monitoring dan evaluasi berkala menjadi langkah penting dalam mengukur efektivitas implementasi pembelajaran mendalam, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi perbaikan berbasis data.

Pada akhirnya, pembelajaran mendalam bukan sekadar pendekatan, melainkan sebuah gerakan transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, pembelajaran mendalam diharapkan dapat menjadi katalisator dalam menciptakan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus mendorong perubahan yang lebih baik, memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, serta bersama-sama mewujudkan transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001